

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN TEPIAN MAHAKAM

Putri Anju Aini¹, Kadek Dristiana Dwivayani²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis penerapan Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Taman Tepian Mahakam oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan rendahnya penerapan komunikasi pembangunan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan RTH terhadap pemahaman masyarakat mengenai RTH. Ditemukan kendala seperti kurangnya koordinasi, keterlibatan masyarakat yang terbatas, dan tidak memiliki program edukasi. Penelitian merekomendasikan peningkatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat melalui program partisipatif dan edukasi, serta perencanaan komunikasi yang lebih matang. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup memperdalam analisis faktor penghambat komunikasi, studi perbandingan dengan kota lain, dan evaluasi mendalam terhadap strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan terkait RTH.

Kata Kunci: *Komunikasi Pembangunan, Pemerintah Kota, Mengelola Ruang Terbuka Hijau*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: putrianju10@gmail.com .

²Dosen Pengajar dan Dosen Pembimbing, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara berkesinambungan oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Suryono.2011). Pada penelitian ini akan secara khusus memusatkan perhatian pada pengalaman Kota Samarinda, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menyelidiki proses komunikasi pembangunan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang mempengaruhi perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan ruang terbuka hijau, dengan fokus utama pada Taman Tepian Mahakam sebagai objek studi. (Nasution Z 2019).

Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan yang muncul, seperti penggunaan RTH yang tidak efektif, dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi lainnya yang terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran komunikasi pembangunan dalam konteks pengelolaan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau berupa taman kota. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengatur mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional negara. Mencakup proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program pembangunan nasional, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang termasuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hasil penelitian Santoso, E.B (2022) mengungkapkan bahwa masih ada beberapa permasalahan terkait RTH di Kota Samarinda, seperti keterbatasan lahan untuk RTH, permasalahan SDM, anggaran yang terbatas, distribusi ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Sejumlah langkah telah diambil, tetapi disarankan untuk mempertimbangkan pembentukan bank tanah, penyesuaian alokasi RTH berdasarkan fungsi ekologis, peningkatan SDM dan anggaran, serta peningkatan kepemimpinan yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat.

Meningkatnya jumlah pengunjung di Taman Tepian Mahakam berdampak pada berbagai aspek, selain berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, dampak negatif yaitu permasalahan di RTH tersebut, sehingga dibutuhkan pengelolaan secara efektif pada pembangunan tersebut. Permasalahan yang muncul merupakan aspek alam seringkali terabaikan, banjir, pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada lokasi yang diperuntukkan, lingkungan RTH yang kotor dan kumuh, rusaknya asset perkotaan, premanisme, kemacetan, parkir liar, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menunjang tujuan pembangunan pemerintah tersebut. Jika masyarakat tidak terlibat dalam pembangunan, akan mempengaruhi efektivitas dan keseimbangan pembangunan tersebut.

Fokus penelitian ini mengadopsi pendapat Schramm (1964) seperti yang dikutip dalam Raharjo, T.B., & Kartika, T. (2019) mengenai tugas pokok komunikasi dalam pembangunan berupa menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Komunikasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek, dan bentuk komunikasi seperti apa yang digunakan pemerintah dalam hal memberikan pemahaman dan pembelajaran yang mendidik terhadap seluruh elemen yang terlibat, sehingga mampu merubah pengetahuan, sikap dan juga tindakan sesuai dengan tujuan dari pembangunan tersebut. dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemerintah kota memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi RTH agar tetap terjaga keberadaannya. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan RTH tidak hanya bergantung pada kesediaan dan kemampuan pemerintah, tetapi juga bergantung pada bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana komunikasi pembangunan pemerintah Kota Samarinda dalam mengelola ruang terbuka hijau Taman Tepian Mahakam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dan mengidentifikasi kendala dalam penerapan komunikasi pembangunan tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Teori Fungsional (Tradisi Sosiokultural Komunikasi)

Teori fungsional merupakan suatu pandangan dalam komunikasi yang mengakui adanya beragam faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas. (Littlejohn, S.W., & Foss, K.A. 2014). Teori ini memandang proses komunikasi sebagai sebuah alat di mana kelompok membuat keputusan, dengan menekankan hubungan antara kualitas dan hasil kelompok.

Teori struktural-fungsional memiliki dasar asumsi yang berkaitan dengan konsep tatanan sosial. Teori ini meyakini bahwa masyarakat bersifat statis atau bahkan seimbang, dengan setiap elemen masyarakat memainkan perannya untuk menjaga stabilitas tersebut (Ida Bagus Wirawan, 2012). Akar teori struktural-fungsional dapat ditemukan dalam karya Emile Durkheim (Emirbayer, M 2018), serta antropolog lainnya seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer (Jay Rumney, 2017). Mereka mengusulkan suatu sistem pemikiran sosial yang komprehensif.

Menurut Durkheim, masyarakat dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari suatu sistem dengan bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat terjaga dan dipertahankan ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Hubungan timbal balik antara setiap bagian membuatnya saling terkait dan bergantung satu sama lain, sehingga jika

salah satu bagian tidak berfungsi, maka sistem mengalami kondisi patologis di mana keseimbangan terganggu (Nugroho A.C 2021).

Empat komponen penting dalam teori struktural fungsional menurut Parsons (Hisyam, C.J 2021) yaitu : *Adaptation, Goal Atainment, Integration, dan Latency*.

Adaptation (Adaptasi)

sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.

Goal Attainment (Pencapaian tujuan)

setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut.

Integration (Integrasi)

setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada *equilibrium* (keseimbangan).

Latency (latensi)

sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan memiliki pengertian yang luas, mencakup peran dan fungsi dalam pertukaran pesan timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses pembangunan, pelaksanaan, hingga penilaian pembangunan (Nasution Z 2019).

Menurut Everett M. Rogers (dalam Sumadi Dilla, 2012), pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan yang bermanfaat menuju sistem sosial dan ekonomi yang diinginkan oleh suatu bangsa. Rogers juga mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi dasar dari perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan, perubahan yang diharapkan adalah perubahan menuju kondisi yang lebih baik atau lebih maju daripada sebelumnya. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam pembangunan harus terkait dengan arah perubahan dan mampu mengantisipasi perkembangan pembangunan (Andrian, B. 2020).

Pandangan Ilmu Komunikasi Schramm (1964) dalam (Raharjo, T..B., & Kartika, T. 2019) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan, yaitu :

1. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka memahami kebutuhan akan perubahan, kesempatan

- yang tersedia, serta cara untuk melakukan perubahan. Hal ini juga bertujuan untuk menginspirasi aspirasi nasional.
2. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan memperluas dialog dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perubahan. Selain itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin masyarakat untuk mendengarkan suara rakyat kecil. Dalam konteks ini, penting juga untuk memastikan adanya aliran informasi yang lancar dari bawah ke atas.
 3. Mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pendidikan harus dimulai sejak dini, dari pembelajaran membaca dan menulis hingga pengembangan keterampilan teknis yang dapat mengubah kehidupan masyarakat.

Peran Komunikasi Pembangunan

Menurut ahli Soetomo, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bukanlah sekadar mobilisasi, melainkan merupakan bentuk partisipasi yang didasarkan pada kemauan dan kecerdasan. Dalam konteks peran komunikasi pembangunan, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek (Syandi, M. 2020). Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengemukakan ide dan gagasan mereka dalam pembangunan, karena mereka yang memiliki pemahaman terbaik tentang potensi dan konsekuensi pembangunan yang akan mereka rasakan.

Fasilitas Publik

Ruang publik adalah ruang atau layanan yang ditawarkan oleh negara atau sektor publik kepada masyarakat umum. Tujuan dari ruang publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hiburan, pendidikan, pengobatan, transportasi, dan lain-lain. Ruang publik juga mencakup kawasan atau infrastruktur yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau lainnya. Fasilitas umum yang dibahas dalam penelitian ini adalah kawasan hijau berupa taman kota atau Taman Tepian (Abdurachman U,2019).

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah praktik yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan ruang terbuka yang berhubungan dengan alam atau lingkungan, seperti taman, taman kota, taman nasional, taman lingkungan, koridor hijau, atau daerah konservasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga, meningkatkan, dan mengoptimalkan manfaat ekologis, sosial, dan estetika dari ruang terbuka hijau tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder diperoleh, dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni menentukan informan kunci dan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini melibatkan Bidang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda di Bidang Pertamanan atas nama Bapak Bapak Ronny Alfiany S.Hut, serta 9 informan pendukung yang merupakan 6 pengunjung rutin Taman Tepian Mahakam, 2 Ketua RT (08 dan 09) yang dekat dengan wilayah RTH, serta 1 warga setempat dengan kriteria yang sudah ditentukan peneliti di teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian

Peran komunikasi dalam proses pembangunan berkaitan dengan arah perubahan, yang mengimplikasikan bahwa kegiatan komunikasi perlu memiliki kemampuan untuk memproyeksikan perkembangan pembangunan (Zahara, E., 2018: 10). Komunikasi harus dikelola dengan baik, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan saat ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang harus menerapkan komunikasi pembangunan sebagai penghubung informasi masyarakat untuk mendorong lebih banyak partisipasi dalam program pembangunan, salah satunya adalah pembentukan kawasan hijau wilayah Kota Samarinda dan juga sebagai wujud pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Durkheim, masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat dibangun dan dipelihara ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Begitupun dalam tatanan struktur pemerintah dengan masyarakatnya terkait program-program yang diinisiasikan, mereka memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan program tersebut. Nugroho A (2021). Dalam konteks penelitian ini, teori fungsional dapat membantu dinas lingkungan hidup untuk memahami faktor dan hambatan yang mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan masyarakat serta mengevaluasi program komunikasi dan informasi terkait pengelolaan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan (RTH) dari Taman Tepian Mahakam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan kawasan hijau masih rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat dan pengunjung di Taman Tepian Mahakam yang belum sepenuhnya memahami hakikat ruang terbuka hijau (RTH), peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai ruang hijau, munculnya permasalahan sosial pada ruang hijau. kurangnya program ruang hijau yang disediakan pemerintah dan kurangnya partisipasi dan koordinasi pemerintah-masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai unsur komunikasi pembangunan, maka dinas lingkungan hidup dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menata dan mengelola ruang publik sesuai dengan kepentingan umum dengan mengetahui kekurangan dan hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan. Ruang terbuka hijau Taman Tepian Mahakam. Dalam konteks teori fungsional, tujuan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pelaksanaan komunikasi pembangunan yang selama ini masih kurang, dan untuk mewujudkan keberagaman faktor yang mempengaruhi kegiatan dalam pembangunan.

Teori fungsional sangat sesuai dalam penelitian ini untuk melihat adanya ketidakstabilan tatanan fungsi dalam proses pembangunan Taman Tepian Mahakam oleh pemerintah sebagai pihak yang memprakarsai pembangunan dan juga stakeholder (masyarakat) sebagai penerima manfaat pembangunan. Terbukti dari hasil penyajian data, pemerintah jadi mengetahui kekurangan dalam sistem mereka, dan mampu mencari solusi dan program-program guna meningkatkan keefektivitasan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan RTH Taman Tepian Mahakam. Serta menyadari keterlibatan masyarakat yang harus terus ditingkatkan guna menjaga kestabilan pembangunan.

Fungsi komunikasi melibatkan penyampaian informasi sebagai aspek utama, bersama dengan tujuan-tujuan seperti mendidik, menghibur, melakukan pengawasan, dan mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain (Suharno, 2016: 33-37). Terdapat lima fungsi utama dari komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, memberikan edukasi, memberikan hiburan, melakukan pengawasan, dan mempengaruhi. Dalam setiap interaksi komunikasi, baik individu maupun kelompok memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi.

Dalam menjalankan komunikasi pembangunan terkait Taman Tepian Mahakam, pemerintah Kota Samarinda Dinas Lingkungan Hidup telah mengimplementasikan berbagai strategi penyampaian informasi. Proses ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari forum diskusi pada tahap perencanaan hingga pemanfaatan media sosial dan kerjasama dengan media massa. Saluran komunikasi utama melibatkan berbagai platform, termasuk forum diskusi untuk melibatkan perwakilan kelurahan dan kecamatan namun hanya diawal. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp juga digunakan untuk menyampaikan informasi harian DLH. Kerjasama dengan media massa, seperti Kaltim Post, diakui sebagai saluran efektif dalam meningkatkan transparansi dan mencapai berbagai lapisan masyarakat.

Isbandi (2007: 27) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai partisipasi dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat, mengambil keputusan mengenai alternatif solusi untuk menangani masalah, melaksanakan upaya untuk mengatasi masalah, dan terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam konteks penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tepian Mahakam. Melalui wawancara dengan Ronny Alfiany pada tanggal 2 November 2023, dapat disimpulkan bahwa masyarakat terlibat dalam pemeliharaan taman setelah pembangunan selesai, dengan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait RTH Taman Tepian Mahakam. Upaya ini melibatkan berbagai mekanisme, Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus agar keterlibatan masyarakat dan pemeliharaan taman dapat optimal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena keterlibatan dan partisipasi masyarakat masih berada di tahap penerimaan informasi.

Dalam konteks penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil untuk menjaga dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya Taman Tepian Mahakam. Meskipun perhatian terhadap pendidikan tenaga kerja dalam hal ini telah dilakukan, terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang perlu diatasi oleh pemerintah. Pak Ronny Alfiany menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah telah merekrut petugas parkir dari masyarakat sekitar, tetapi ada kendala terkait pengelolaan parkir yang masih kurang terkontrol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengunjung Taman Tepian Mahakam mengenai RTH masih bersifat terbatas. Mayoritas dari mereka mengidentifikasi Taman Tepian Mahakam sebagai tempat rekreasi dan kegiatan umum, tanpa menyadari peran strategisnya dalam ekosistem kota. Di sisi lain, Ketua RT, sebagai pemimpin masyarakat setempat, juga menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai RTH. Informasi yang diterima sebagian besar bersumber dari grup WhatsApp RT, dan kesadaran mereka terhadap program-program pemerintah terkait RTH juga masih perlu ditingkatkan. Mereka merasa kurang dilibatkan dalam pembangunan RTH, dan harapannya adalah pemerintah dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan informasi yang jelas, dan melibatkan mereka lebih aktif dalam proses pembangunan RTH.

Dalam konteks penelitian ini juga menggambarkan sejumlah kendala dalam penerapan komunikasi pembangunan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tepian Mahakam di Kota Samarinda. Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian tersebut yaitu koordinasi pemerintah dan masyarakat, keterlibatan dan dukungan masyarakat, program atau pelatihan terkait ruang terbuka hijau, dan perencanaan komunikasi

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu memperbaiki komunikasi pembangunan pemerintah DLH dalam mengelola RTH Taman Tepian Mahakam :

1. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk forum diskusi, media sosial, dan kerjasama dengan media massa. Penyampaian informasi harus lebih jelas dan persuasif.
2. Upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat perlu diperkuat, termasuk melalui program-partisipatif yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan RTH.
3. Diperlukan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan peran RTH. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan swasta untuk menyelenggarakan program tersebut.
4. Perencanaan komunikasi yang lebih matang diperlukan, termasuk pemilihan metode komunikasi yang tepat, penargetan audiens yang sesuai, dan pemilihan pesan yang efektif. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus dilakukan.
5. Koordinasi antara pemerintah dengan OPD terkait dan masyarakat perlu ditingkatkan. Harus ada pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Forum atau mekanisme yang memfasilitasi komunikasi langsung perlu didirikan untuk menghindari ketidakhahaman terkait tujuan pembangunan dan rencana.
6. Melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan Keputusan terkait RTH Taman Tepian Mahakam akan meningkatkan rasa memiliki dan dukungan masyarakat. Pemerintah dapat mengadakan pertemuan, lokakarya, atau survei untuk mendapatkan masukan langsung dari warga sebelum mengimplementasikan proyek.
7. Pemerintah perlu memperluas saluran komunikasi, tidak hanya mengandalkan kelurahan dan kecamatan. Penggunaan media sosial, situs web resmi, dan materi cetak dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lebih luas.
8. Pemerintah perlu membuat pendekatan komunikasi dengan alur top down dan bottom up.
9. Pemerintah harus memetakan pemangku kepentingan dengan membuat stakeholder mapping (menetapkan stakeholder atau sasaran komunikasi secara terstruktur).

10. Pemerintah diharapkan membuat strategi perencanaan komunikasi sesuai dengan profesionalitas seorang ahli komunikasi.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan penulis. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat meningkatkan strategi komunikasi pembangunannya dalam pengelolaan RTH yang ada di Samarinda dan mampu mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif. Semoga langkah-langkah yang diusulkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pemerintahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Suryono, (2011). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Nasution, Z. (2019). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. Rajawali.
- Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 103-126.
- Raharjo, T. B., & Kartika, T. (2019). *Komunikasi sosial dan pembangunan*. Katalog Dalam Terbitan (KDT), 70.
- Littlejohn. S. W., & Foss, K.A. (2014). *Theories of human communication*. Waveland Press edisi 9, Jakarta Salemba Humanika
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Nasution, A. F (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, (55).